

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali Achmad Chomzah. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta. Prestasi Pustaka. Jakarta;
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung; Citra Aditya Bakti,
- Adryan Sutedi, 2012, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta;
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang- Undang (Legisprudence)*. Vol. I Pemahaman Awal. Kencana Prenada Media Group. Jakarta;
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agrarian Indonesia*. Sejarah Pembentukan Uupa Isi Dan Pelaksanannya. Cet 8. Djambatan.Jakarta;
- Boedi Harsono I 2008. "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*",Djambatan. Jakarta;
- Chandras. 2005. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah: Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*.Grasindo. Jakarta;
- Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya;
- Effendi Perangin.1994. *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawal Pers. Jakarta;
- Fx. Sumarja. 2015. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Univertsitas Lampung.Bandar Lampung;
- . 2015. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Edisi Revisi. Universitas Lampung. Bandar Lampung;
- . 2008. *Hukum Tata Guna Tanah Di Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung;
- H.M Arba. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta;

Indroharto. 2002. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta;

Irwansyah dan Ed Ahsan Yunus. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi. Cetakan ke-3. Mirra Buana Media. Yogyakarta;

Jimmy Joses Sembiring. 2010. *Panduan Mengurus Sertifikat Tanah*. Visimedia. Jakarta;

Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta;

Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja. 2004. *Hak-Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta;

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2103. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan ke-2. Pustaka Pelajar. Yogyakarta;

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta;

----- . 2017. *Penelitian Hukum edisi revisi*. Kencana. Jakarta;

----- . 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta;

Supriadi. 2009. *Hukum Agraria*. Cetakan 3. Sinar Grafika. Jakarta;

Sutedi Adrian. 2012. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika. Jakarta;

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Media Pratama, Jakarta;

Urip Santoso. 2001. *Hukum Agraria*. Edisi Pertama. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Utoyo Sutopo, 1992, *Masalah Penyalahgunaan Sertifikat Dalam Masyarakat Dan Upaya Penanggulangan Nya*, Yogyakarta;

Yamin Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Cv. Mandar Maju. Bandung.

Zainal Asikin, 2020, *Mengenal Filsafat Hukum*, Yogyakarta.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah ;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, No.1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada BPN;

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Negara Agrarian No.3 Tahun 1997 Tentang Pemindahan Hak Atas Tanah;

Peraturan Menteri Agrarian Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertipikat Elektronik;

Makalah:

I Kadek Arinata, Makalah Penyelesaian Sengketa Peralihan Hak atas Tanah Pada Tanah Hak Pengelolaan yang Dilakukan oleh Pihak Ketiga di Pelabuhan Benoa, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Jurnal:

Al Araaf Ode Pota. A. Suyaman M.Pide. Sri Susyanti Nur. 2022.Vol.4. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa*. Widya Pranata Hukum.

Ade Ariyani.Farida Patittingi.Sri Susyanti Nur. 2022.Vol.30. *Perlindungan Hukum Ahli Waris Lainnya Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Antara*

Orang Tua Dan Anak. Amanna Gappa.

Dwi Laksa Marabintang. Andi Suriyaman M. Pide. Muhammad Ilham Arisaputra. 2022. Vol. 5. *Balik Nama Pada Sertifikat Yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum.* Widya Yuridika.

Hasaziduhu Moho, 2019. Vol. 13. *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,* Jurnal Warta Dharmawangsa;

Istijab. 2018. Vol. 1. *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria.* Jurnal Widya Yuridika Hukum.

Supriyono. 2016. Vol. 14. *Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat,* Jurnal Ilmiah Fenomena;

Tesis:

Aditya Prabowo. 2016. *Pelaksanaan Pelaksanaan Konversi Hak Atas Tanah Bekas Swapraja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta).* Tesis. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Web Dan Wawancara:

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-pemecahan-sertifikat-tanah-warisan-1t4f87045287357/>.

<https://www.deNk.com/properN/Nps-dan-panduan/d-7000699/cara-syarat-dan-biaya-pecah-serNfikat-tanah-2023-gampang-kok>,

<https://layanan.hukum.uns.ac.id/data/RENSI%20file/Data%20Backup/Don%20To%20BackUp/TEORI%20KEPASTIAN%20HUKUM.docx>,

<https://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>,

Wawancara bapak Muhammad Malkan Sikki, SH sebagai kepala seksi penetapan hak dan pendaftaran Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pangkep

Wawancara dengan Ibu Andi Batari Bombang Petugas Loker pada Kantor Pertanahan ATR/BPN di Kabupaten Pangkep